

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari seluruh penjelasan yang penulis uraikan pada skripsi ini, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan yang didapat dari pokok-pokok pembahasan dalam uraian di diatas, antara lain:

1. Langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Bekasi dalam proses mewujudkan perencanaan pada pembentukan Kabupaten Bekasi Utara masih dalam tahapan pertama yaitu dengan melakukan studi kelayakan yang menjadi syarat administrasi untuk dilanjutkan dengan merekomendasikan hasil studi kelayakan tersebut ke pemerintah provinsi Jawa Barat agar dapat ditindak lanjuti pada tahap selanjutnya.
2. Didalam dinamika politik yang terjadi khususnya pembentukan Kabupaten Bekasi Utara terjadi gesekan kepentingan antara kelompok yang ingin memekarkan pembentukan dengan pemerintah sehingga terjadi polemik karena adanya kecenderungan besarnya potensi ekonomi yang dimiliki oleh Kabupaten Bekasi Utara. Selain itu, dari 3 kecamatan yang menjadi obyek penelitian, gesekan kepentingan yang besar terkonsentrasi di wilayah Babelan.
3. Partisipasi masyarakat di beberapa Kecamatan yang berada di Bekasi khususnya pada bagian Kecamatan yang ingin dimekarkan masih minim dan masih dilihat sebagai *given* (diberikan) dan belum dipahami sebagai hak yang melekat pada masyarakat sehingga keberadaan hak masyarakat

tidak berimplikasi pada timbulnya kewajiban pada stakeholder lain untuk mendongkrak partisipasi masyarakat khususnya dalam program yang telah direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Selain itu, dapat diprediksi bahwa partisipasi masyarakat di 3 Kecamatan masih terlihat pasif khususnya dalam mensosialisasikan kebijakan sebagai tanggung jawab bagi masyarakat karena dilatarbelakangi oleh kondisi sosial ekonomi yang masih rendah, yang membuat masyarakat menjadi pasif serta pengetahuan, minat dan perhatian pun menjadi faktor dari lemahnya partisipasi masyarakat terhadap pembentukan Kabupaten Bekasi Utara. Khususnya dalam partisipasi politik masyarakat di 3 kecamatan yang telah ada dalam berbagai bentuk dan bidang-bidang pembangunan secara infrastruktur masih lemah dan kurang layak untuk di pergunakan bagi masyarakat. sehingga nantinya akan mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap pembentukan Kabupaten Bekasi Utara.

B. SARAN

Dalam penelitian ini dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat yaitu faktor sosial ekonomi, faktor politik, faktor individu dan lingkungan perlu mendapat perhatian lebih lanjut bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam pengambilan keputusan/kebijakan khususnya pada kebijakan pemekaran Kabupaten baru terutama dalam faktor nilai budaya, karena secara uji empirik faktor ini menjadi pengaruh yang sangat dominan

terhadap partisipasi politik masyarakat khususnya terhadap pembangunan didalam suatu daerah yang ingin lebih maju.

2. Dalam memasuki era otonomi daerah yang sekarang ini terjadi dalam perencanaan pemerintah Kabupaten Bekasi hendaknya lebih memasifkan kembali pelayanan-pelayanan dalam bentuk infrastruktur maupun suprastruktur khususnya dalam sektor administrasi kependudukan dan memberikan motivasi, dan penambahan fasilitas di daerah Bagian Utara demi penguatan pelayanan di Beberapa Kecamatan, sehingga masyarakat Bekasi bagian utara akan lebih mudah mendapatkan akses khususnya pada setiap program yang sedang di rencanakan oleh pemerintah Kabupaten serta dapat meningkatkan partisipasi politik dan swadaya masyarakat dalam pembangunan di beberapa Kecamatan yang berada di Bagian Utara.